

5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kestabilan kondisi politik dan keamanan sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Stabilitas politik dan iklim politik yang kondusif akan menciptakan suasana aman, tertib, tentram dan damai guna mewujudkan keberhasilan pelaksanaan tujuan pembangunan untuk mendukung terselenggaranya pembangunan daerah secara dinamis.

Berbagai bentuk kriminal dan potensi konflik horizontal merupakan gangguan keamanan yang dapat meresahkan dan berakibat pada pudarnya rasa aman masyarakat. Terjaminnya keamanan dan adanya rasa aman bagi masyarakat merupakan syarat penting bagi terlaksananya pembangunan daerah di berbagai bidang. Pembangunan keamanan dan ketertiban diarahkan pada terwujudnya kondisi yang aman, tertib dan tentram, serta tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terciptanya situasi yang kondusif bagi pembangunan daerah.

Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan melalui penataan sistem keamanan, peningkatan kualitas aparat keamanan dan peningkatan partisipasi masyarakat. Penataan sistem keamanan dan ketertiban dilakukan untuk membangun sistem keamanan terpadu yang berbasis masyarakat dengan membangun koordinasi dan kerjasama secara sinergis antara masyarakat, satuan linmas, polisi pamong praja, dan kepolisian sebagai inti. Peningkatan kualitas aparat keamanan dan ketertiban dilakukan melalui peningkatan kemampuan profesional dan pemantapan kualitas moral dan etika, serta meningkatkan budaya disiplin disertai dengan peningkatan kesejahteraan.

Pada tahun 2016, pelaksanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat dilakukan oleh beberapa OPD antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Kesbangpol, dan Satpol PP dan Linmas.

a. Program dan Kegiatan

Berbagai program dan kegiatan pada tahun 2016 dilaksanakan untuk menciptakan masyarakat dan lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatif terhadap munculnya kerawanan-kerawanan sosial, politik serta bencana yang dapat meresahkan masyarakat, peningkatan komitmen bersama dalam penciptaan kondusifitas daerah guna mendukung kelancaran, keberlanjutan dan stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, meningkatkan kesadaran semua pemangku kepentingan terhadap bela negara dan tanggap terhadap berbagai gangguan kantrantibmas yang mungkin terjadi serta mampu menumbuhkan kesadaran semua masyarakat untuk mengetahui, memahami dan mentaati berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 untuk melaksanakan urusan ini dialokasikan sebesar Rp. **14.880.405.850,00** dengan realisasi anggaran Rp. **14.255.715.235,00** atau **95.80%** . Program dan alokasi anggaran untuk Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.B.5.1
Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Trantibum dan Linmas Tahun 2016

No.	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
A	Belanja Langsung	6.954.598.850	6.752.918.195
1	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	100,000,000	100.000.000
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	867,229,950	845.180.528
3	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan Masyarakat	65,000,000	65.000.000
4	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	100,000,000	93.595.000
5	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	975,000,000	938.758.100
6	Program pendidikan politik masyarakat	170,000,000	170.000.000
7	Program pengembangan wawasan kebangsaan	1,611,000,000	1,574,483,650
8	Program peningkatan disiplin aparatur	155,500,000	152.404.000
9	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	2,185,757,400	2,102,323,100
10	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	100,000,000	100.000.000
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	575,111,500	561.048.917
B	Belanja Tidak Langsung	7.925.807.000	7.502.797.040
	Belanja Pegawai	7.925.807.000	7.502.797.040
	Jumlah Total	14.880.405.850	14.255.715.235

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 (diolah)

b. Realisasi Program dan Kegiatan

1) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Pengenalan nilai-nilai sejarah berdirinya kabupaten Wonosobo pada generasi penerus dengan kegiatan Ziarah ke 7 makam pendiri kabupaten Wonosobo ini untuk untuk mewujudkan pemahaman jiwa patriotisme dan perjuangan tokoh pendiri kabupaten wonosobo sehingga generasi penerus dapat meneladani dan mewarisi sifat sifat serta nilai nilai kejuangan para pendiri wonosobo, pelaksanaan kegiatan ini digelar menjelang Hari Jadi Kabupaten Wonosobo, ke tujuh makam yang di kunjungi adalah:

1. Makam Tumenggung Jogonegoro di Pakuncen, Selomerto,
2. Makam Tumenggung Selomanik di Kaliwiro
3. Makam Bupati Mangunkusumo, di Ketinggring, Wonosobo.
4. Makam KH Muntaha di Desa Deroduwur, Mojotengah,
5. Makam KH Asmosufi di Sapuran,
6. Makam H Abdul Fatah di Desa Tegalgot, Kepil
7. Makam KRT Setjonegoro, atau yang juga dikenal dengan nama Muhammad Ngarpah dan istrinya, R Aj T Setjonegoro di Dusun Kauman, Desa Payaman Magelang

2) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program ini berkaitan erat dengan pelaksanaan rangkaian acara Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia, untuk menanamkan pemaknaan akan wawasan kebangsaan kepada masyarakat Wonosobo dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada kegiatan tahun 2016 pengembangan wawasan kebangsaan mulai ditanamkan bukan hanya kepada generasi muda, pengenalan pada tingkat anak-anak di tingkat PAUD yang merupakan jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar sebagai suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak dini. Pelaksanaannya di 40 PAUD/TK se kabupaten Wonosobo dengan total peserta 1500 anak usia dini.

Wujud lain dari kegiatan dalam program ini adalah forum ceramah wawasan kebangsaan dan diskusi wawasan kebangsaan bersama Siswa SLTP/MTs/SLTA/SMK, Tokoh masyarakat, Tokoh agama, SLTP SLB putra don bosco dan SLB putri dena upakara agar meningkat rasa cinta tanah air dan bangsa, rasa persatuan dibidang impolek sosbud hankam demi tegaknya NKRI berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

3) Program Pendidikan Politik Masyarakat

Pembinaan Politik bagi Masyarakat dan Pemuda bertujuan untuk mengembangkan pendidikan politik masyarakat sebagai bagian pendidikan politik yang merupakan

rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan, guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga merupakan konsep bagian dari proses perubahan kehidupan politik yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif dan efisien

Pada Program ini juga dilakukan pembinaan terhadap ormas sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, pembinaan dilakukan dengan tujuan bahwa Ormas memahami kewajibannya yang antara lain menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat.

4) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Maksud dari program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam ini adalah sebagai salah satu upaya dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana melalui sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan terhadap bencana, optimalisasi penanggulangan bencana alam, bantuan kepada korban bencana alam dan bencana lainnya, serta rehabilitasi dan konstruksi penanganan pasca bencana. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Optimalisasi dan Fasilitasi Penanggulangan Bencana, Fasilitasi Pengurangan Resiko Bencana, Optimalisasi Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalop), Fasilitasi Pemberian Bantuan Kepada Korban Bencana Alam, Fasilitasi bagi tim SAR dan relawan, serta berbagai pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi bencana yang dilaksanakan di beberapa wilayah kecamatan. Selain itu sebagai pendukung operasional penanganan bencana juga telah dilakukan pengadaan perahu karet dan pengadaan logistik bencana yang disesuaikan dengan kebutuhan. Berbagai kegiatan yang dilakukan secara sinergis antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bagian Soskesra Setda dan beberapa kecamatan di Kabupaten Wonosobo merupakan upaya pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam yang lebih optimal sehingga masyarakat yang menjadi korban bencana alam dan bencana lainnya dapat segera terbantu dan tertangani.

5) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Lingkungan yang kondusif memberikan ketenangan bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Wonosobo, melalui Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan beberapa kegiatan dibawah mendukung pencapaian tersebut:

- Fasilitasi Operasional Forkompimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) yang merupakan pertemuan rutin para pimpinan daerah untuk membahas isu-isu strategis Kabupaten Wonosobo.
- Operasional PAM Pilkades, pada tahun ini pelaksanaan Pilkades serentak digelar

di 30 desa berlangsung di akhir bulan November 2016

- Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Wonosobo, kegiatan ini memfasilitasi terjadinya Konflik Sosial di Wilayah Kabupaten Wonosobo
- Fasilitasi PAM Tamu/Pejabat Asing/Daerah, semakin diliriknnya kabupaten Wonosobo dari berbagai sektor potensinya berimbas pada bertambahnya Pejabat yang berkunjung ke Kabupaten Wonosobo, pengamanan tamu-tamu kabupaten ini memberikan gambaran yang positif pada kabupaten Wonosobo
- Fasilitasi TIM Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tk Kabupaten Wonosobo Kegiatan ini untuk mengurangi Konflik Sosial di Kabupaten Wsb dan Penanganan seteterjadi Konflik, Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Kab.Wsb.
- Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Terselenggaranya Pemerintahan yang aman, Kondusif dan Terkendali
- Kegiatan Kelinmasan (Upacara dan Pengerahan) dan Fasilitasi Kegiatan Linmas, Siaga Linmas/PAM Lebaran, Natal dan Tahun Baru yang berupa Diklat dan Pembinaan menyeluruh meliputi Penanggulangan bencana, Kamtramtibmas, Sosial, Pemilu dan Pertahanan Negara dengan tujuan Meningkatkan Ketrampilan Anggota Linmas dalam Melaksanakan Tupoksi. Sebagai hasil akhir harapan keamanan dan ketentramanan di masyarakat bisa terpenuhi.
- Pembinaan Operasi PPNS dilaksanakan dengan tujuan pemahaman proses pembinaan, penanganan pelanggaran Perda sesuai dengan tugas dan kewenangan PPNS yaitu mengawal kebijakan Pemerintah Kabupaten
- Kegiatan lain :Pengamanan Rangkaian Hari Jadi Kabupaten Wonosobo dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan sehingga operasi dan patroli Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Wonosobo yang dilaksanakan bersama-sama dengan Polres, Kodim, Muspika dan Kasi Trantibum se-Kabupaten Wonosobo maksimal dapat dilaksanakan

6) Program Pemeliharaan Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminalitas

Kebutuhan data Ormas Fasilitasi dan validasi Data lembaga non pemerintah, kegiatan ini untuk mendukung kegiatan pembinaan ormas dan memperoleh pembaharuan data Ormas, Rapat Tim, Pembinaan PEPABRI, DHC 45.

Pentingnya Pembinaan Ormas ini dengan maksud untuk;

- meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat,
- memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;

- mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau

7) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) dimaksudkan untuk mencegah ataupun memberantas tindakan/perbuatan yang muncul dan dapat meresahkan anggota masyarakat sehingga dapat tercipta situasi yang aman, kondusif dan terkendali di wilayah Kabupaten Wonosobo. Program ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan berupa penanggulangan Kenakalan Anak, Remaja/Pelajar yang dilaksanakan melalui operasi pelajar pada jam pelajaran di tempat-tempat keramaian seperti di warnet, pertokoan/pasar maupun di tempat permainan game.

Kegiatan lain untuk mendukung program ini adalah Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yaitu memberantas penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkoba kegiatan ini berupa sosialisasi dan Operasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

8) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dimaksudkan untuk mendukung pelayanan yang dilakukan oleh SKPD pengampu urusan ini yaitu Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kantor Satpol PP dan Linmas, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kegiatan yang dilakukan adalah Penyediaan jasa surat menyurat; Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; Penyediaan jasa administrasi keuangan; Penyediaan Alat Tulis Kantor; Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; Penyediaan makanan dan minuman; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah; Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor, kota dan pasar; serta Penyelesaian pekerjaan kantor.

Hasil dan manfaat yang diraih dalam penyelenggaraan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah menunjangdan memperlancar pelaksanaan pekerjaan serta tersedianya sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung pelayanan umum pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini juga dimaksudkan untuk mendukung kelancaran dalam melaksanakan

urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri melalui kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor; serta Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor. Hasil dan manfaat yang diraih dalam penyelenggaraan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah mendukung kenyamanan dan mempercepat pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

10) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program peningkatan disiplin aparaturnya dilaksanakan dengan pengadaan pakaian dinas Satpol PP dan Linmas, pakaian dinas BPBD, pakaian lapangan BPBD dan DAMKAR. Kegiatan tersebut terutama dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seragam Pakaian Dinas untuk Anggota Satpol, Linmas Desa, personil BPBD dan DAMKAR. Untuk personil BPBD selain pakaian dinas juga disediakan pakaian lapangan yang digunakan dalam pelaksanaan penanganan bencana.

Kegiatan lain dari program ini adalah pengiriman pasukan untuk mengikuti HUT Satpol. PP dan Jambore Nasional Pol. PP yang pada tahun ini berpusat di dua kabupaten yaitu Kabupaten Pati dan Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah

11) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Kondisi morfologi Kabupaten Wonosobo yang sebagian besar berupa perbukitan memaksa kesiapsiagaan menghadapi bencana yang bisa terjadi kapan saja, selain itu perilaku manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam berpengaruh pada semakin turunnya kualitas lahan yang bisa memicu terjadinya bencana. Pengurangan resiko bencana menjadi tantangan tersendiri disini melalui Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam yang kegiatannya sebagai berikut:

- Optimalisasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan untuk penanganan korban bencana, melayani korban bencana dan penanganan penanggulangan bencana
- Pembinaan relawan/SAR untuk meningkatkan kapasitas anggota relawan dalam rangka pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, bentuk dari kegiatan ini adalah pelatihan relawan/SAR.
- Fasilitasi bulan Pengurangan Resiko Bencana yang merupakan Agenda Nasional berupa Gelar Pasukan kesiapsiagaan penanggulangan resiko bencana
- Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan dini dan penanggulangan bencana untuk mengurangi resiko bencana dan tertanganinya korban bencana alam berupa pengadaan alat-alat dapur, GPS, perahu motor dan peralatan rescue
- Pengadaan logistik, untuk memenuhi kebutuhan korban bencana
- Optimalisasi pusat pengendalian operasi, dilaksanakan untuk kelancaran

penanganan darurat bencana dan kesiap-siagaan pusat kendali operasi

c. Capaian Kinerja Urusan Trantibum dan Linmas

Capaian kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Wonosobo dilihat dari IKP dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2016 mengalami kenaikan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel IV.B.5.2
Indikator Kinerja Program Urusan Trantibum dan Linmas Tahun 2016
Berdasarkan RPJMD 2016-2021

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Capaian Kinerja	
		2015	2016
1	Prosentase kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan dan fasilitasi penyelesaiannya	100%	100%
2	Prosentase Siskamling aktif	50%	55%
3	Prosentase FKDM yang aktif	65%	65%
4	Prosentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	75%	75%
5	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan keindahan) di Kabupaten / kota	85%	85%
6	Angka kriminalitas yang tertangani	70%	70%
7	Rasio kasus penyakit masyarakat/PEKAT (pornografi, pornoaksi, penyalahgunaan narkoba, perjusian prostitusi, dan berbagai jenis pratik asusila) per 1.000 penduduk	0.025	0.025
8	Cakupan Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	0.25	0.25
9	Cakupan rasio petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/kota	1.25	1.23
10	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 penduduk	0.64	0.64
11	Prosentase Linmas terlatih	9%	9%
12	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa / kelurahan	4.74	4.74
13	Persentase lembaga keagamaan dan kemasyarakatan yang telah berbadan hukum Indonesia yang mendapat bantuan pemerintah daerah.	65%	70%
14	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (Jumlah tempat ibadah / jumlah penduduk) x 1000	4,42	4,42
15	Persentase kecamatan yang sudah memiliki pemetaan detail rawan bencana	13	13
16	Persentase Desa Rawan bencana yang	2	2

IV.B.5. Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Capaian Kinerja	
		2015	2016
	terpasang EWS (early warning system)		
17	persentase dokumen rencana kontinjensi yang tersusun terhadap total jenis bencana	12.5	25
18	rapor ketangguhan bencana	dtd	sedang
19	Persentase dokumen jenis bencana yang sudah tersusun dalam rencana kontinjensi	12.5	12.5
20	cakupan pelayanan bencana kebakaran	91	92
21	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK	30	35
22	Persentase desa siaga bencana	25	25

Sumber : Kantor Kesbangpol, Satpol PP dan BPBD Kab. Wonosobo

Pembinaan politik daerah terus dilaksanakan baik ditujukan kepada LSM, Ormas dan OKP dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun dengan jumlah rasio personil Satpol PP per 10.000 penduduk serta rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk yang masih dibawah ideal, namun tetap dapat mempertahankan dan meningkatkan kemampuan mendeteksi dini berbagai potensi gangguan kantrantibmas, dan juga semakin menguatkan ketahanan masyarakat terhadap gangguan kantrantibmas. Aksi massa terhadap kebijakan daerah atau demo/protes terhadap Perda, Perbub pada Tahun 2016 bisa ditangani dengan baik.

Tabel IV.B.5.3
Elemen Data EKPPD Urusan Trantibum dan Linmas

No.	Elemen Data	Satuan	Tahun	
			2015	2016
1	Jumlah LSM aktif	unit	6	10
2	Jumlah Linmas	orang	7.226	7.226
3	Jumlah pos siskamling	pos	1.256	1.256
4	Jumlah tindak kriminal dalam 1 thn (yang terdaftar di kepolisian)	kasus	205	76
5	Jumlah demonstrasi dalam 1 thn	kasus	5	6
6	Jumlah Polisi Pamong Praja	orang	51	51

Sumber: Kantor Kesbangpol dan Satpol PP Kab. Wonosobo 2016

Peningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas sebagai salah satu prioritas pembangunan telah dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Kondisi yang kian kondusif memberikan harapan bagi peningkatan rasa nyaman bagi kehidupan masyarakat untuk dapat menjalankan segenap aktivitasnya dengan baik, disini lain maraknya peredaran narkoba mengalami peningkatan di tahun ini, diperlukan upaya yang intensif semua pihak menangani dan menyikapi salah satu tindak kriminal ini.

Upaya penanggulangan gangguan keamanan, ketertiban dan tindak kriminalitas menunjukkan peningkatan walaupun masih banyak ditemukan gangguan keamanan

IV.B.5. Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

dan hambatan. Upaya pemberantasan yang relatif intensif dengan penggelaran Operasi Kepolisian Kewilayahan maupun Operasi Kepolisian Terpadu dengan Instansi terkait menunjukkan hasil yang signifikan. Langkah Pemerintah tersebut akan terus dilakukan secara konsisten dan seyogyanya didukung penuh oleh seluruh lapisan masyarakat agar kondisi aman dan tertib dapat semakin diwujudkan. Perkembangan jumlah kasus kriminalitas di Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.B.5.4
Data Kriminalitas di Kabupaten Wonosobo

No.	Jenis Kriminalitas	Tahun	
		2015	2016
1	Pembunuhan	-	1
2	Pencurian dengan Pemberatan	21	13
3	Pencurian Kendaraan Bermotor	10	18
4	Pencurian dengan Kekerasan	11	6
5	Penodongan	-	-
6	Zina / Pemerkosaan	3	1
7	Unjuk Rasa	5	6
8	Kasus Tanah	-	-
9	Konflik SARA	-	-
10	Perkelahian/Penganiayaan	-	-
11	Kejahatan Narkoba	16	22
12	Kejahatan Mata Uang Palsu	-	1
	Jumlah	55	50

Sumber Data : Kantor Kesbangpol Kab. Wonosobo 2016

Masyarakat yang tangguh bencana ialah masyarakat yang mampu mengantisipasi dan meminimalisir kekuatan yang merusak, melalui adaptasi. Mereka juga mampu mengelola dan menjaga struktur dan fungsi dasar tertentu ketika terjadi bencana. Dan jika terkena dampak bencana, mereka akan dengan cepat bisa membangun kehidupannya menjadi normal kembali atau paling tidak dapat dengan cepat memulihkan diri secara mandiri, Mampu mengantisipasi dan meminimalisasi kekuatan yang merusak (ancaman bencana), dengan cara melakukan adaptasi, Mampu mengelola dan menjaga stuktur dan fungsi dasar tertentu ketika terjadi bencana, Kalau terkena dampak bencana, mereka akan dengan cepat bisa membangun kehidupannya menjadi normal kembali.

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam ini mampu meminimalisir korban dan dampak negatif akibat terjadinya bencana dari sekian banyak bencana alam terutama bencana tanah longsor yang terjadi mengingat kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis Kabupaten Wonosobo yang potensial terjadi bencana, baik yang disebabkan karena faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam tingkat kondisi tertentu dapat menghambat pembangunan daerah.

Tabel IV.B.5.5
Data Bencana Alam di Kabupaten Wonosobo

No.	Indikator	Tahun	
		2015	2016
1	Banjir	1	1
2	Gempa Bumi	-	-
3	Angin Topan	4	5
4	Tanah Longsor	21	28
5	Kebakaran Hutan	5	-
6	Kebakaran Rumah	28	8
	Jumlah	61	49

Sumber Data : BPBD Kab. Wonosobo 2016

d. Permasalahan dan Solusi

Tabel IV.B.5.6
Matriks Permasalahan dan Solusi pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Permasalahan	Solusi/Upaya yang perlu dilakukan
1.	Pengaruh komunikasi global yang membuat perkembangan begitu cepat pada masyarakat tidak hanya memberikan dampak positif namun juga membawa dampak negatif dengan masuknya informasi-informasi yang tidak benaryang tidak sesuai dengan nilai-nilai etika, moral, dan budaya politik yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Disparitas kualitas kehidupan masyarakat yang masih lebar serta kondisi daerah yang belum mampu secara optimal mengatasi masalah ekonomi dan sosial mengakibatkan pengangguran merupakan salah satu faktor utama penyebab terjadinya tindak kriminal. Hal yang harus dihadapi dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah masih tingginya angka kriminalitas seperti pencurian, penipuan, perampokan, kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan susila, sampai dengan kasus-kasus pembunuhan juga peran dan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan dirasa masih kurang.	Mengintensifkan komunikasi antara masyarakat dan Muspida, penanaman wawasan kebangsaan kepada masyarakat, menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat akan arti pentingnya keamanan dan ketertiban dalam rangka pelaksanaan pembangunan sebagai usaha perwujudan jaminan keamanan dan kestabilan politik daerah yang tangguh demi terselenggaranya pemerintahan daerah yang aman, tertib dan demokratis adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi beberapa kendala/permasalahan tersebut.